

BAB IV

HASIL PENELITIAN

C. Deskripsi Obyek Penelitian

Berikut ini adalah Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

1. Letak Geografis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan salah satu Dinas yang bergerak pada bidang pemberdayaan di Kabupaten Blitar. Kantor DPMD beralamatkan di Jalan Nias No. 02 Kota Blitar

2. Tugas Pokok dan Fungsi DPMD

Sesuai dengan buku Rencana Strategis DPMD Kabupaten Blitar, “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Blitar”.⁶⁹

DPMD Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁶⁹Buku Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, h. I-4

3. Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

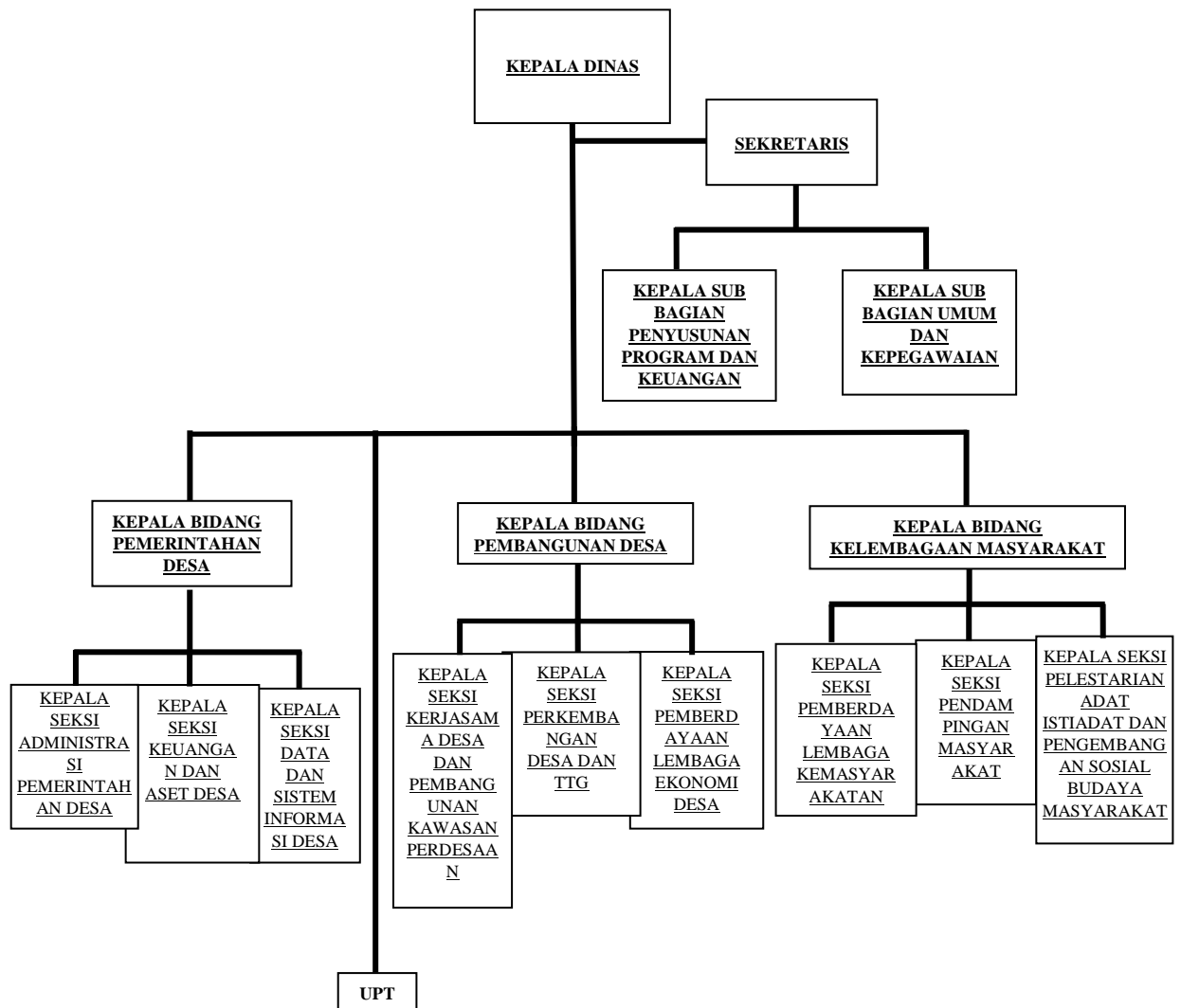
“DPMD Kabupaten Blitar merupakan *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan serta dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Blitar.”⁷⁰ Di dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah proses bisnis dimana terdiri dari serangkaian gambaran strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Proses bisnis merupakan sebuah teknik untuk mendukung, merancang, menganalisa dan kemudian diimplementasikan untuk mendukung proses bisnis organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

⁷⁰Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, h. I-4

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Gambar 4. Struktur Organisasi DPMD⁷¹

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**



⁷¹ Papan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

D. Temuan Penelitian

3. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar dalam menyongsong pembangunan berbasis desa, maka DPMD melalui tugas pokok dan fungsinya melakukan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, DPMD Kabupaten Blitar berperan antara lain yaitu sebagai:

- a. Pemecah Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang wajar dan bisa saja terjadi kapanpun namun bisa dihindari ataupun hadapi dengan adanya solusi untuk mengatasinya. Jika masalah tersebut tidak diatasi maka di lain waktu akan dirasakan kembali dan terus menjadi masalah hingga ditemukannya sebuah solusi. Maka adapun masalah yang dihadapi dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata adalah antara lain yaitu:

- 1) Muncul Kepastian Hukum Pembangunan Agrominawisata.

Permasalahan yang pernah dihadapi Pemerintah Desa yaitu permasalahan payung hukum. Sebagai agen pemberdaya masyarakat dan desa, DPMD mempunyai peran membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan desa. DPMD dengan melakukan pembinaan serta sosialisasi mengenai dasar hukum pembangunan kawasan perdesaan serta pembinaan pembuatan peraturan desa merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat dan desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Setiono:

“Sebenarnya Agrominawisata ini dibentuk untuk membantu masyarakat dan juga desa dalam mengeksplor potensi lokal masing-masing desa, akan tetapi tidak semua desa awalnya merespon dengan baik, ada beberapa desa yang masih ragu untuk bergabung karena dana yang akan dikumpulkan sebagai iuran nanti takut sia-sia. Upaya yang awal kita lakukan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yaitu dengan ditetapkannya Kecamatan Nglegok sebagai Kawasan Perdesaan sesuai dengan teknis pemilihan lokasi dan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2018 tentang rencana Pembangunan Perdesaan, ini kita sosialisasikan kepada pemerintah desa di Kecamatan Nglegok sebagai dasar hukum pembentukan kawasan ini, selanjutnya kita lakukan pembinaan pembuatan Perdes (Peraturan Desa) dalam penguatan hukum di internal desa sendiri. Jadi pemerintah desa lebih optimis dan berani dalam menganggarkan dana karena mempunyai dasar hukum yang jelas.”⁷²

Sesuai dengan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa DPMD yang melalui Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan maksud mengatasi permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa khususnya pada dasar hukumnya. Pemerintah desa sebagai wakil dari masyarakat di desa masing-masing sebagian besar menyambut baik pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata dan ada juga yang masih takut dan ragu untuk bergabung. Dengan adanya sosialisasi Peraturan Bupati serta pembinaan pembuatan Perdes diharapkan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata tanpa ada kendala pada payung hukum. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tantowi Jauhari:

“Memperhatikan pada SK Bupati Blitar tahun 2019 tentang pembentukan TKPKP Kab.Blitar. Kami sesuai dengan

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

tugas dan fungsi dalam pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu salah satunya melakukan supervisi, sosialisasi dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Camat dan Kepala Desa. Meskipun belum secara maksimal, tetapi semua sudah kita lakukan salah satunya yang paling utama adalah sosialisasi tentang dasar hukum dari Pemerintah Kabupaten hingga dari kementerian serta pembuatan dasar hukum lokal desa yaitu Peraturan Desa atau yang biasa kita kenal dengan Perdes.”⁷³

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Tantowi di atas, DPMD menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SK Bupati Blitar tentang pembentukan TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan) Kabupaten Blitar yaitu dengan melakukan supervisi, sosialisasi, dan memotivasi pembangunan Kawasan Perdesaan Kepada BKAD, Camat dan Kepala Desa. Memang meskipun belum secara maksimal tetapi DPMD sudah melakukan pembinaan pengenalan dasar hukum pembentukan Kawasan Perdesaan dan juga pembinaan pembuatan Perdes dengan desa-desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Yudhi:

“Dalam sebuah program pastinya harus memiliki sebuah dasar hukum yang jelas, nah sementara payung hukum yang tersedia adalah dari Peraturan Menteri Desa PDTT dan juga Peraturan Bupati Blitar tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan juga TKPKP yang harus mempunyai RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan). Kemudian dari desa sendiri kita bina untuk menyusun Peraturan Desa yang dibantu oleh Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Hal ini kita lakukan agar terjadi kejelasan yang optimis dalam perencanaan maupun pelaksanaan kedepannya.”⁷⁴

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Jauhari, SP sebagai Sekretaris di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

Berdasarkan pemaparan Bapak Yudhi di atas dapat kita ketahui bahwa dalam sebuah program pastinya harus memiliki sebuah dasar hukum atau payung hukum. Karena jika sebuah program dilandasai dengan dasar hukum yang jelas dan kuat maka perjalanan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kedepannya. Dengan adanya dasar hukum juga akan membantu memperkuat dalam pertanggungjawaban kelak ketika sebuah program telah dilaksanakan memerlukan laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Dari Kecamatan, Kabupaten, DPMD, dari OPD yang jelas melakukan pengecekan. Pendampingan juga, kendala-kendala apa yang terjadi. Jadi paling tidak memang biar lebih cepat juga makanya langsung di plot. Jadi misalkan Desa Kemloko sebelum adanya Program Agrominawisata ini posisi sana sudah sentra ikan koi, seperti Desa Penataran sebelum ada Program ini kan sudah unggul lokasi wisata dari dulu, Desa Sumberasri sendiri di sini kita juga sudah berpuluh-puluh tahun sentra agro disini terutama duren, nanas, alpukat. Berarti dari segi pendampingan nggak mulai dari no ngajari, tinggal memoles, menambah, menyulam saja apa yang kurang. Seperti membuat Peraturan Desa sebagai dasar hukumnya kegiatan ini, juga pendanaanya awal kita iuran sebesar Lima Juta rupiah dari anggaran APBDes masing-masing desa serta struktur kelembagaannya juga dibentuk melalui BUMDESMA dan juga BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Untuk lebih bagusnya bagaimana dan untuk menyesuaikan dengan program yang ada, tapi beliau-beliaunya terus aktif mendampingi bagusnya bagaimana.”⁷⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya program Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini memang dari

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

masing-masing desa sudah memiliki potensi unggulan masing-masing desa sesuai dengan klaster. Lalu dengan adanya program Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini di plot sesuai dengan klaster agro, mina, dan wisata sehingga pemerintah dan juga DPMD dalam melakukan pendampingan tidak mulai dari nol, tetapi tinggal memoles menambah menyulam saja apa yang kurang. Dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini diperlukan dasar hukum dan DPMD melakukan pembinaan pembuatan Perdes (Peraturan Desa) sebagai dasar desa dalam pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban desa.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Dari DPMD ya sudah ada bentuk kerjasama dengan instansi terkait, dulu juga dibina suruh membuat Perdes (peraturan desa) terkait agrominawisata. Dari DPMD itu sering datang ke sini mengadakan monev perkembangan DD ADD dari Inspektorat juga, dari Dinas Pariwisata juga sering ke sini. Sifatnya mengadakan pembinaan pada perangkat khususnya dan pada masyarakat pada umumnya tentang kinerja.”⁷⁶

Berdasarkan pemaparan Bapak Nasruddin di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD sering datang ke Desa Kemloko dan juga Dinas terkait untuk melakukan monev (monitoring evaluasi) perkembangan DD (Dana Desa) ADD (Alokasi Dana Desa) sifatnya mengadakan pembinaan pada perangkat desa dan juga masyarakat. DPMD juga melakukan pembinaan dalam

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

pembuatan perdes (Peraturan Desa) terkait Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Yang sudah kita lakukan, kita sudah membangun kerjasama dengan desa-desa tetangga yang mempunyai potensi unggulan pariwisata, dan itu kita bekerjasama dengan 6 desa lainnya dalam naungan BUMDESMA untuk membangun Kawasan Perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Nglegok. Sejauh ini yang sudah kita lakukan dengan pebinaan dari DPMD itu ya, kita sudah menyusun Perdes yang isinya itu kerjasama berdiri payung hukumnya. Nah untuk selanjutnya kita menunggu pendampingan lagi dari DPMD dan juga arahan dari kecamatan.”⁷⁷

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Ambar di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Penataran melakukan kerjasama dengan desa tetangga yang mempunyai potensi unggulan pariwisata dan juga kerjasama dengan 6 desa yang lain yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata di dalam naungan BUMDESMA untuk membangun Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Desa Penataran juga sudah melakukan penyusunan Perdes (Peraturan Desa) dengan dibina DPMD yang isinya itu kerjasama berdiri payung hukum pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Kami sebagai pengurus BUMDESMA memang belum banyak komunikasi dengan Dinas PMD. Memang dari

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

dibentuk kami ini kan belum ada bimbingan teknis. Baru kemarin sekitar bulan kemarin saya dapat bimbingan teknik dari Kementerian Desa PDTT. Setelah ini berangkat saya mau konsultasi, mau komunikasi dengan pemerintah utamanya Dinas PMD yang memiliki keahlian di bidang pembangunan kawasan ini. Kalau di desa memang 7 desa yang tergabung dalam BUMDESMA ini memang jarang bertemu lagi setelah dibentuk SK dan membuat Perdes serta penyertaan modal dari APBDes, itu baru beberapa bulan yang lalu lah SK penetapan dari BUMDESMA dan Agrominawisata ini. Ya yang jelas kami pun karena komunikasi ini belum terjalin dengan PMD jadi mungkin kami masih terhambat disitu, koordinasinya masih kurang.”⁷⁸

Dari pemaparan Bapak Saiful Mujab diatas dapat diketahui bahwa sebagai pengurus BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok, memang masih tergolong baru dan masih kurang dalam hal koordinasi. Bapak Saiful selaku BUMDESMA juga menyebutkan bahwa dari 7 desa yang tergabung dalam BUMDESMA dan Agrominawisata memang sudah merespon dengan membuat Perdes sebagai dasar hukum serta penyertaan modal dari masing-masing desa.

Berdasarkan penjelasan dari ketujuh narasumber dapat disimpulkan bahwa DPMD dalam peran pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata membantu pemerintah desa sebagai mitra pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata dalam pembinaan pembuatan payung hukum yaitu Perdes (peraturan desa), sehingga desa lebih yakin dalam perencanaan maupun pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat nantinya.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

2) Tersedianya Anggaran untuk Pendanaan Agrominawisata

Permasalahan selanjutnya yang pernah dihadapi Pemerintah Desa dan lembaga BUMDesa yaitu permasalahan pendanaan. Pada umumnya, bentuk kerjasama antar desa yang sudah biasa dilakukan hanya masalah sosial dan keamanan lingkungan. Program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata merupakan sebuah hal yang baru di Kecamatan Nglepok ini maupun di Kabupaten Blitar.

Bentuk kerjasama antar desa yang berorientasi pada profit memang belum pernah dilakukan. Hal inilah yang membuat desa pada awalnya agak merasa bimbang dan ragu dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini, terlebih memang tidak ada dana khusus dari Pemerintah Daerah. Dengan upaya pendekatan dan sosialisasi serta pengenalan Kawasan Perdesaan, akhirnya desa merespon baik dan dilakukan pembinaan dalam pembuatan Perdes serta penyertaan modal dari masing-masing desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Hal ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat dan desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Setiono:

“Terkait masalah pendanaan dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglepok ini, pada awalnya kita arahkan melalui penyertaan modal dari desa-desa yang dituangkan dalam APBDes desa masing-masing sebanyak 7 desa yaitu minimal dan rata-rata sebesar lima juta rupiah dan ada juga yang lebih. Total nominal gabungan penyertaan modal dari masing-masing desa memang bisa dibilang masih tergolong sedikit, tetapi dana tersebut bisa digunakan untuk internal Kawasan Perdesaan Agrominawisata sendiri, sementara untuk kegiatan yang sifatnya pembinaan dan koordinasi kita fasilitasi melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang dituangkan

dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) kegiatan pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan, dan selanjutnya kalau sudah berkembang akan kita dampingi dalam mengajukan bantuan pendanaan.”⁷⁹

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Edy diatas dapat kita ketahui bahwa memang tidak ada dana khusus yang ditujukan untuk operasional pada suatu Kawasan Perdesaan salah satunya Kawasan Perdesaan Agrominawisata, hal ini memang sebuah hambatan ditambah program ini merupakan sebuah hal yang baru sehingga banyak menimbulkan keraguan.

DPMD memberikan solusi dengan melakukan pendampingan dalam pembuatan Perdes dan penyertaan modal yang dianggarkan dari APBDes masing-masing desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata dengan nominal minimal sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk digunakan internal Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang dinaungi oleh BUMDESMA. Untuk kegiatan yang sifatnya pembinaan dan koordinasi DPMD memfasilitasi melalui anggaran dari APBD Kabupaten Blitar pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Dengan ini diharapkan mampu mengatasi masalah dalam hal pendanaan. Dalam hal ini Bapak Tantowi juga menambahkan:

“Kembali mengacu pada SK pembentukan TKPKP Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Sesuai tugas dan fungsinya kita melalui kegiatan yang diampu oleh Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan memang tidak ada dana khusus untuk kawasan perdesaan tertentu, tapi kita membina dan mengarahkan untuk pendanaan swadaya dari masing-masing desa, sekarang ini kan desa sudah mempunyai anggaran yang bisa dibilang

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

banyak yaitu DD ADD maupun pendapatan lain, tapi terkait rapat-rapat koordinasi juga kita dukung dan pendanaan dibebankan pada kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasa Perdesaan Dinas PMD.”⁸⁰

Dari pemaparan Bapak Tantowi di atas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya memang tidak ada dana khusus yang ditujukan untuk suatu kawasan perdesaan, akan tetapi DPMD melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pendanaan swadaya dari masing-masing desa yaitu dari APBDes. Sementara kegiatan pembentukan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang sifatnya koordinasi dan rapat-rapat juga dibantu oleh DPMD. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Yudhi:

“Masalah terkait dari pendanaan memang sementara belum ada dan khusus terkait hal tersebut, akan tetapi terus kita dampingi dari segi perencanaan desa agar isu Kawasan Perdesaan Agrominawisata juga menjadi perhatian dari pemerintah desa agar dalam anggaran tahun selanjutnya muncul dalam segi penganggaran dari desa agar program ini dapat terlaksana dengan baik.”⁸¹

Dari pemaparan Bapak Yudhi di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD juga melakukan pembinaan dari segi perencanaan desa agar isu kawasan perdesaan Agrominawisata menjadi perhatian dari pemerintah desa. dengan perhatian khusus tersebut dimaksudkan agar dukungan dari desa lebih terlihat yang secara awal dari penganggaran dari APBDes dan seluruh elemen yang ada di desa lebih terintegrasi dalam mendukung program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Jauhari, SP sebagai Sekretaris di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Pemerintah Desa sendiri sudah dari dulu, kita dari APBDes selalu menganggarkan di situ, walaupun bentuk penganggarnya tidak berupa fisik juga. Selain fisik kita juga mendukung dengan program-program yang jelas selain untuk kesejahteraan masyarakat, suatu contoh ada pemberdayaan. Untuk pembuatan perdes sudah kita laksanakan begitu juga dengan penyertaan modal awal sebesar lima juta seperti desa yang lain juga.”⁸²

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono diatas dapat kita ketahui bahwa Desa Sumberasri dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang sudah dilakukan adalah dengan membuat Perdes dan juga menganggarkan seperti halnya desa lain yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selain berupa fisik juga menganggarkan untuk program-program yang mendukung pembangunan ini yaitu berupa pembinaan dan pelatihan yang meningkatkan kemampuan masyarakat dan kader-kader Desa Sumberasri.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Kalau bentuk pendampingan DPMD sendiri kan masih dalam ranah pendanaan dan kelembagaan. Pendanaan kan sudah masuk ke APBDes to mas, dari desa-desa itu iuran bersama sebagai modal awal tapi Desa Kemloko menyertakan

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

lebih yaitu sepuluh juta, kalau minimalnya kan lima juta. Lalu dari kelembagaannya pelaku-pelaku itu yang dibina, penguatan kelembagaannya.”⁸³

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Nasrudin di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Kemloko dalam pendanaan menyertakan modal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lebih dari ketentuan minimal yaitu sebesar Rp. 5.000.000 rupiah setiap desa yang dianggarkan dari APBDes sebagai modal awal.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Pada intinya respon kita semua itu positif. Jadi dalam masyarakat terutama pokdarwis itu sebetulnya nanti akan seperti apa, yang diberikan waktu bimtek itu kan mesti menguntungkan gini-gini, nah kita itu masih menunggu jadi apa betul menguntungkan, efektifnya bagaimana kita menunggu arahan dan hal teknisnya kita menunggu. Sedangkan kita juga sudah dibina dalam hal modal juga siap menganggarkan untuk modal awal 5 juta per desa sama dengan desa-desa yang lain, jadi kita sudah sepakat kita susun dalam APBDes. Kita ancang-ancang kita anggarkan 5 juta per desa, kalau nanti ada 7 desa yang bekerjasama, ada 35 juta, itu karena masih modal awal sementara kita kan Penataran punya potensi, Kemloko punya potensi, nah karena konsep teknisnya itu belum muncul, ya kita masih 5 juta itu. Nanti kalau betul-betul menguntungkan, berani kita untuk menambah.”⁸⁴

Berdasarkan pemaparan Bapak Ambar di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Penataran merespon dengan positif dengan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Pemerintah Desa Penataran juga masih

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

menunggu pembinaan dan arahan-arahan selanjutnya. Dalam hal modal, DPMD membina desa-desa untuk menyertakan modal awal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai modal awal yang disusun dalam APBDes. Menurut Bapak Ambar dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per desa dan dengan adanya 7 desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai modal awal. Kalau nanti betul-betul menguntungkan, Bapak Ambar menyatakan berani dalam menyertakan modal tambahan.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Pemerintah desa kan sudah mendukung 100% bahkan menyisihkan anggaran. Penyertaan anggaran ditetapkan di ADD itu sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat itu saja. Terutama saya selaku pengurus BUMDESMA ini nanti bagaimana kita menjalankan kegiatan ini.”⁸⁵

Dari pemaparan Bapak Saiful di atas selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok, dapat kita ketahui bahwa pemerintah desa sudah mendukung 100% bahkan menyisihkan anggaran, penyertaan anggaran yang ditetapkan di ADD (Alokasi Dana Desa). selanjutnya tinggal bagaimana dukungan masyarakat dan juga beliau sendiri bersama pengurus BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok dalam menjalankan program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

Berdasarkan penjelasan dari ketujuh narasumber dapat disimpulkan bahwa DPMD dalam peran pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata membantu pemerintah desa sebagai mitra pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata dalam hal mencari solusi pendanaan.

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sendiri memang tidak ada penganggaran yang tertuju secara langsung untuk sebuah Kawasan Perdesaan, namun melalui DPMD terdapat sebuah program dan kegiatan yang secara spesifik membina dalam pembangunan Kawasan Perdesaan seperti halnya Agrominawisata ini. Kawasan perdesaan dibina dan selanjutnya akan dibantu dalam pengajuan bantuan dana dari Pemerintah Daerah maupun pusat.

3) Terbentuknya Kelembagaan Pengurus Agrominawisata.

Permasalahan lain yang pernah dihadapi Pemerintah Desa yaitu permasalahan Kelembagaan. Kelembagaan masyarakat merupakan sebuah hal yang penting karena sebagai penggerak dan pelopor keberhasilan dan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata merupakan hal yang baru karena merupakan bentuk kerjasama desa yang berorientasi pada profit yang memerlukan kelembagaan khusus yang berkompeten dalam hal tersebut.

Sebagai agen pemberdaya masyarakat dan desa, DPMD mempunyai peran membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan desa. DPMD dengan melakukan pembinaan dan pembentukan kelembagaan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat dan desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Setiono:

“Bentuk kepengurusan Kawasan Perdesaan Agrominawisata masih sebatas pada pembentukan kelembagaan kawasan perdesaan yang meliputi kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan 7 desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan Agrominawisata yang kemudian bentuk kerjasama dari BKAD tersebut melalui terbentuknya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dengan nama BUMDESMA Bumi Penataran yang kantor kesekretariatannya terletak di Kantor Kecamatan Nglegok.”⁸⁶

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Edy di atas dapat kita ketahui bahwa kepengurusan kelembagaan Kawasan Perdesaan Agrominawisata masih sebatas pada pembentukan kelembagaan yang meliputi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan 7 desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan Agrominawisata yang kemudian bentuk kerjasama dari BKAD tersebut melalui terbentuknya BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan letak kantor kesekretariatannya ada di Kantor Kecamatan Nglegok. Dalam hal ini Bapak Sumari memberikan pendapat:

“Masyarakat di kawasan tersebut sangat antusias dalam berkontribusi meningkatkan potensi unggulan daerahnya masing-masing agar lebih maju dan dikenal oleh masyarakat luas karena mereka sadar bahwa hal tersebut secara langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Terlebih dari masing-masing desa juga sudah mempunyai Pokdarwis dan di Kecamatan Nglegok ini juga sudah ada pembentukan kelembagaan BKAD Badan Kerjasama Antar Desa dan juga BUMDESMA Badan Usaha Milik Desa Bersama yang waktu itu dinamakan

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

*BUMDESMA Bumi Penataran yang secara kapasitas dibina khusus untuk mendukung Agrominawisata.*⁸⁷

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Sumari di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat sangat antusias dalam berkontribusi meningkatkan potensi unggulan masing-masing daerahnya agar lebih maju dan dikenal masyarakat luas yang secara langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bapak Sumari juga menyebutkan bahwa kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan juga BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) yang dinamakan BUMDESMA Bumi Penataran. BKAD dan BUMDESMA tersebut dibina secara khusus agar berkompeten dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

*“Agrominawisata ini walaupun di sini kan ada pokjanya sendiri, saya cuma mengetahuilah sedikit. Tapi pada intinya itu dari pokok program Agrominawisata itu kan programnya DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu membentuk suatu kawasan yang untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa masing-masing dalam suatu kerjasama. Jadi selain itu juga untuk mengangkat PAD masing-masing desa dan untuk usaha bersama telah dibentuk lembaga salah satunya namanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti itu.”*⁸⁸

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Budi Kuantono di atas dapat kita ketahui bahwa agrominawisata merupakan sebuah program dari DPMD yaitu

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

membentuk suatu kawasan yang bertujuan untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa masing-masing dalam suatu kerjasama. Selain itu juga untuk mengangkat PADes (Pendapatan Asli Desa) masing-masing desa dan untuk usaha bersama telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan Badan Usaha yang bergerak dalam menjalankan program pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Dengan desa lain Agrominawisata ya sementara ini sudah terbentuk kepengurusan dari 7 desa yaitu BKAD dan BUMDESMA, tapi untuk koordinasi masih kurang.”⁸⁹

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Nasruddin di atas dapat kita ketahui bahwa sementara sudah terbentuk kepegurusan dari 7 desa yaitu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama), akan tetapi memang dalam hal koordinasi masih kurang.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Pendampingan dari DPMD sendiri ya sudah ada tapi masih diminta membuat kelompok, dibentuk BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan juga BUMDESMA, diusahakan perdes, tapi nanti untuk riilnya kan belum ya.”⁹⁰

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Ambar di atas dapat kita ketahui bahwa pendampingan yang sudah dilakukan oleh DPMD adalah pembentukan kelompok-kelompok, pembentukan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan juga BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan juga diusahakan dalam pembuatan Perdes (Peraturan Desa), tapi dalam pelaksanaan memang belum begitu banyak hal yang dilakukan oleh kelembagaan tersebut selain koordinasi.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglekok:

“Secara konsep karena programnya adalah kawasan. Jadi secara otomatis kawasan sudah tersedia, BUMDESMA juga sudah terbentuk dan kebetulan ketuanya saya sendiri, kan di dinas sendiri tentu ada perencanaan yang matang juga, lalu tinggal bagaimana kita mengemas nanti kawasan itu menjadi lahan atau jadi tujuan wisata dari berbagai daerah ya utamanya kalau bisa dari luar negeri, saya malah bersyukur. Ibaratnya kawasan ini tinggal mengembangkan, karena kawasan sudah ada jadi secara inti masyarakat di sini kesiapannya memang masih apa adanya, karena belum tahulah. Perlu adanya sosialisasi.”⁹¹

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Saiful di atas dapat kita ketahui bahwa secara konsep karena programnya adalah kawasan jadi secara otomatis kawasan sudah tersedia. Dari segi kelembagaan juga sudah dibentuk BUMDESMA (Badan Usaha Milik Bersama) yang diketuai oleh beliau Bapak Saiful Mujab yang berasal dari Desa Kemloko Kecamatan Nglekok.

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglekok pada tanggal 8 Desember 2019

Bapak Saiful juga menyampaikan harapannya pada Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini yang tinggal mengemas dan menjadi sebuah tujuan wisata yang semoga menjadi tujuan wisatawan dari luar negeri. Tentu hal tersebut akan bisa terwujud jika kelembagaan yang ada seperti halnya BKAD dan juga BUMDESMA mampu mengemas Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini menjadi sebuah kawasan yang mempunyai ciri khas dan memperlihatkan potensi unggulannya.

Melalui DPMD Kawasan Perdesaan Agrominawisata bisa menjadi rumah dalam pemberdayaan masyarakat dan juga desa. Dalam kawasan tersebut tentu akan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat karena Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang didalamnya terdapat BUMDESMA merupakan wadah besar yang memiliki kerjasama antar BUMDESMA lain yang berada di lingkup kabupaten, propinsi, maupun nasional. Tentu hal ini akan menimbulkan sinergitas potensi Agrominawisata di Kecamatan Nglegok.

Dari beberapa tanggapan mengenai bentuk upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh DPMD dalam pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata yaitu permasalahan kelembagaan yaitu membentuk kelembagaan yang yang akan menjadi penggerak Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang berkompeten yaitu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan BUMDESMA Bumi Penataran (Badan Usaha Milik Bersama).

b. Fasilitator

DPMD sebagai fasilitator dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengontrolan dan strategi dalam mengatasi kendala kendala yang dihadapi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai wilayah yang dipilih untuk pembangunan kawasan agrominawisata tentu respon sebagaimana diatas memunculkan suatu ide konsep strategi untuk mendukung pembangunan Agrominawisata. Oleh karena itu peran DPMD sangat besar dalam menentukan keberhasilannya dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Dalam hal ini Bapak Edy menjelaskan sebagai berikut:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memang untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dan desa salah satunya dalam program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini. Kita dari tim internal DPMD sendiri yang terdiri dari beberapa seksi dan bidang juga saling bekerjasama dalam hal pendampingan masyarakat dan desa agar lebih terintegrasi apalagi dalam program ini kan perlu keterlibatan banyak pihak. Kita memfasilitasi dalam pendampingan penyelesaian masalah yang bersifat pemberdayaan yang terjadi di masyarakat dan desa. Jika ada masalah kita membantu menyelesaikan lewat rapat-rapat koordinasi dan juga monitoring evaluasi.”⁹²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat dan juga desa termasuk dalam hal pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini. DPMD dengan

⁹²Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

beberapa bidang dan seksinya saling bekerjasama dalam pendampingan agar lebih terintegrasi, terlebih dalam program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini melibatkan banyak pihak. DPMD memberikan fasilitasi berupa pendampingan penyelesaian masalah yang bersifat pemberdayaan yang terjadi di masyarakat dan desa melalui rapat-rapat koordinasi dan juga monitoring evaluasi.

Pemerintah Kecamatan Nglegok memberikan tanggapan tentang fasilitasi pendampingan DPMD dalam pembangunan agrominawisata yaitu Bapak Sumari sebagai berikut:

“Umumnya dinas mempunyai tugas pendampingan kepada Kepala Desa untuk disampaikan ke masyarakat sekitar. Untuk memudahkan penyampaian informasi para masyarakat membentuk kelompok khusus untuk meningkatkan sektor Agrominawisata. Dinas memberikan solusi dari keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para masyarakat Agrominawisata dan akan diberikan solusi pemecahan masalahnya.”⁹³

Dari pendapat Bapak Sumari di atas dapat kita ketahui bahwa seperti pada umumnya DPMD melakukan pendampingan kepada Kepala Desa untuk disampaikan ke masyarakat sekitar, dalam hal ini untuk memudahkan penyampaian informasi para masyarakat dibentuk kelompok khusus untuk meningkatkan sektor Agrominawisata. DPMD memberikan solusi dari keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para masyarakat Agrominawisata dan akan diberikan solusi pemecahan masalahnya.

⁹³Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Dari Kecamatan, Kabupaten, DPMD, dari OPD yang jelas melakukan pengecekan. Pendampingan juga, kendala-kendala apa yang terjadi. Jadi paling tidak memang biar lebih cepat juga makanya langsung di plot. Jadi misalkan Desa Kemloko sebelum adanya program Agrominawisata ini posisi sana sudah sentra ikan koi, seperti Desa Penataran sebelum ada Program ini kan sudah unggul lokasi wisata dari dulu, Desa Sumberasri sendiri di sini kita juga sudah berpuluh-puluh tahun sentra agro disini terutama duren, nanas, alpukat. berarti dari segi pendampingan nggak mulai dari no ngajari, tinggal memoles, menambah, menyulam saja apa yang kurang. Seperti membuat Peraturan Desa sebagai dasar hukumnya kegiatan ini, juga pendanaannya awal kita iuran sebesar Lima Juta rupiah dari anggaran APBDes masing-masing desa serta struktur kelembagaannya juga dibentuk melalui BUMDESMA dan juga BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Untuk lebih bagusnya bagaimana dan untuk menyesuaikan dengan program yang ada, tapi beliau-beliaunya terus aktif mendampingi bagusnya bagaimana.”⁹⁴

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Budi Kuantono di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD melakukan pengecekan, pendampingan dari kendala-kendala apa yang terjadi. Dengan potensi yang sudah unggul dari masing-masing desa, DPMD dari segi pendampingan tidak mulai dari nol, tetapi memoles, menambal, menyulam, dan apa saja yang kurang seperti halnya melakukan pendampingan pembuatan Perdes, pembentukan kelembagaan dan lain sebagainya.

⁹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Dari DPMD ya sudah ada bentuk kerjasama dengan instansi terkait, dulu juga dibina suruh membuat Perdes (peraturan desa) terkait agrominawisata. Dari DPMD itu sering datang ke sini mengadakan ya monev perkembangan DD ADD dari Inspektorat juga, dari Dinas Pariwisata juga sering ke sini. Sifatnya mengadakan pembinaan pada perangkat khususnya dan pada masyarakat pada umumnya tentang kinerja.”⁹⁵

Berdasarkan pemaparan Bapak Nasrudin di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD melakukan fasilitasi dengan memnetuk kerjasama dengan instansi terkait, melakukan pembinaan pembuatan Perdes, terkait agrominawisata, mengadakan Monev (monitoring evaluasi perkembangan DD (Dana Desa) ADD (Alokasi Dana Desa), mengadakan pembinaan pada perangkat desa dan pada masyarakat tentang kinerja.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Pendampingan pembinaan sudah ada tapi masih diminta membuat kelompok, diusahakan Perdes, nanti untuk riilnya kan belum ya.”⁹⁶

Dari pendapat Bapak Ambar di atas bisa kita ketahui bahwa DPMD dalam melakukan fasilitasi pendampingan yaitu masih berupa pembentukan

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

kelembagaan dan membuat Peraturan Desa tetapi masih mempunyai kekurangan dalam pelaksanaan.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Di awal kami dibentuk itu memang kayaknya semua mendukung. Sangat mendukung. Utamanya dari DPMD itu kemarin saya sudah kontak dengan pak Edy. Beliau pun sangat antusias dalam membantu. Apalagi dari Kecamatan waktu itu ya Pak Camat Pak Agus waktu itu. Waktu dibentuk itu Pak Agus yang sangat getol dan semangat untuk membentuk Kawasan Perdesaan Agrominawisata.”⁹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa pada awal BUMDESMA dibentuk, semua mendukung utamanya DPMD. Bapak Saiful menyebutkan bahwa bebrapa waktu sebelum itu beliau melakukan koordinasi dengan Bapak Edy selaku Kepala Seksi Kerjasama desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD, dan beliau menyebutkan bahwa Bapak Edy sangat antusias dalam membantu emngatasi permasalahan yang dialami oleh Bapak Saiful selaku Ketua BUMDESMA Bumi Penataran, begitu juga dengan Bapak Agus selaku Camat Nglegok yang begitu semangat dan getol dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Beberapa pendapat diatas dari berbagai klaster merupakan sebuah bukti bahwa DPMD melakukan fasilitasi yaitu berupa pendampingan yang dilakukan di desa-desa, kecamatan maupun dalam bentuk pembinaan secara bersamaan. Di sisi lain. DPMD juga melakukan pendampingan melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMD baik berupa

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

pendampingan dan pembinaan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, maupun pembangunan perekonomian desa.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Didalam sebuah melaksanakan sebuah program pasti terdapat sebuah faktor pendukung dan penghambatnya, seperti yang dialami DPMD dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang mempunyai faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun eksternal.

- a. Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata, DPMD memiliki faktor pendukung yang dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

- 1) Internal
 - a) Adanya Sumberdaya Aparatur dengan Spesifikasi Khusus.

Faktor pendukung DPMD dari internal salah satunya yaitu Sumberdaya Aparatur. Sumberdaya aparatur merupakan penggerak dan pelaksana dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Dalam hal ini Bapak Tantowi memberikan pendapatnya:

“Sumberdaya aparatur untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Perdesaan juga sudah tersedia dari level kepala bidang dan kepala seksi yang sudah memahami tentang kawasan perdesaan ditambah pelaksana atau staff yang memiliki spesifikasi tentang Kawasan Perdesaan dan itu

semua ditetapkan dalam perjanjian kinerja DPMD tahun 2018, 2019, maupun tahun yang akan datang .”⁹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa sumberdaya aparatur di DPMD tersedia dalam mengembangkan Kawasan Perdesaan agrominawisata, mulai dari level Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sudah memahami tentang Kawasan Perdesaan ditambah pelaksana atau staff yang mempunyai spesifikasi khusus yaitu Analis Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam hal ini Bapak Sumari menambahkan:

“Daerah tersebut memiliki SDM yang kreatif dan jiwa kewirausahaan yang tinggi sehingga mampu memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk berkontribusi meningkatkan kawasan Agrominawisata. Kawasan Agrominawisata sudah banyak dikenal masyarakat luas dari Blitar maupun luar Blitar. Selain itu di desa, kecamatan maupun di dinas sendiri juga punya pejabat yang secara khusus mampu mendampingi pembangunan kawasan ini.”⁹⁹

Dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa faktor pendukungnya adalah daerah yang tercakup dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata memiliki SDM yang kreatif dan jiwa Kewirausahaan yang tinggi sehingga mampu memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk berkontribusi meningkatkan kawasan Agrominawisata. Kawasan Agrominawisata sudah dikenal masyarakat luas dari Blitar maupun dari luar Blitar. Selain itu juga disebutkan bahwa di desa, kecamatan, maupun di dinas juga mempunyai

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Jauhari, SP sebagai Sekretaris di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

pejabat yang mampu mendampingi pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini. Dalam hal ini Bapak Saiful juga menambahkan:

“Kami sebagai pengurus BUMDESMA memang belum banyak komunikasi dengan Dinas PMD. Memang dari dibentuk kami ini kan belum ada bimbingan teknis. Baru kemarin sekitar bulan kemarin saya dapat bimbingan teknik dari Kementrian Desa PDIT. Setelah ini berangkat saya mau konsultasi, mau komunikasi dengan pemerintah utamanya Dinas PMD yang memiliki keahlian di bidang pembangunan kawasan ini. Kalau di desa memang 7 desa yang tergabung dalam BUMDESMA ini memang jarang bertemu lagi setelah dibentuk SK dan membuat Perdes serta penyertaan modal dari APBDes, itu baru beberapa bulan yang lalu lah SK penetapan dari BUMDESMA dan Agrominawisata ini. Yang jelas kami pun karena komunikasi ini belum terjalin dengan PMD jadi mungkin kami masih terhambat disitu, koordinasinya masih kurang.”¹⁰⁰

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Saiful di atas dapat kita ketahui bahwa Bapak Saiful Mujab sebagai pengurus BUMDESMA memang belum banyak komunikasi dengan DPMD dan Bapak Saiful dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan DPMD yang mempunyai keahlian atau sumberdaya yang sudah biasa mengatasi pembangunan kawasan perdesaan.

Sumberdaya aparatur seperti yang disebutkan di atas merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pembangunan Kawasan Perdesaan agrominawisata karena mempunyai spesifikasi khusus dalam kawasan perdesaan. Ketersediaannya sumberdaya aparatur merupakan sebuah komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang ada di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

b) Adanya Dokumen Perencanaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Nglegok ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, hal ini bisa dibuktikan dengan masuknya program ini dalam dokumen perencanaan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Setiono:

“Terkait masalah pendanaan dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok ini, pada awalnya kita arahkan melalui penyertaan modal dari desa-desa yang dituangkan dalam APBDDes desa masing-masing sebanyak 7 desa yaitu minimal dan rata-rata sebesar lima juta rupiah dan ada juga yang lebih. Total nominal gabungan penyertaan modal dari masing-masing desa memang bisa dibilang masih tergolong sedikit, tetapi dana tersebut bisa digunakan untuk internal Kawasan Perdesaan Agrominawisata sendiri, sementara untuk kegiatan yang sifatnya pembinaan dan koordinasi kita fasilitasi melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) kegiatan pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan, dan selanjutnya kalau sudah berkembang akan kita dampingi dalam mengajukan bantuan pendanaan.”¹⁰¹

Berdasarkan pemaparan Bapak Edy di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata dengan penyertaan modal awal dari masing-masing desa, sedangkan dari DPMD sendiri mempunyai dokumen RKA (dokumen Rencana Kerja Anggaran) yang mana didalamnya tertuang acuan rencana kegiatan disertai rekening kegiatan dengan anggarannya. Dengan dokumen ini proses fasilitasi kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini Bapak Yudhi memberikan pendapatnya:

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

“Dari perencanaan Kawasan Perdesaan, kita juga sudah mengakomodasi bahwa Kawasan Perdesaan dapat dikembangkan di Kabupaten Blitar. Hal tersebut senada dengan visi misi Bupati Blitar tahun 2016-2021 di misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan” yang berbasis pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat dan lain sebagainya. Sementara ini kita juga sudah mempunyai masterplan Kawasan Perdesaan Agrominawisata sebagai gambaran pembangunan kawasan dan juga dari internal DPMD sendiri juga rencana tersebut sudah tertuang dalam IKI (Indikator Kinerja Individu) dan juga Renja 2019.”¹⁰²

Berdasarkan pemaparan Bapak Yudhi di atas dapat kita ketahui bahwa perencanaan kawasan perdesaan di akomodasi bahwa Kawasan Perdesaan dapat dikembangkan di Kabupaten Blitar. Hal tersebut senada dengan visi misi Bupati Blitar tahun 2016-2021 di misi yang ke-6 yaitu “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan”. Pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk pemberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan juga masyarakat.

Dalam hal ini Bapak Saiful Mujab selaku BUMDESMA menambahkan:

“Secara konsep karena programnya adalah kawasan. Jadi secara otomatis kawasan sudah tersedia, BUMDESMA juga sudah terbentuk dan kebetulan ketuanya saya sendiri, kan di dinas sendiri tentu ada perencanaan yang matang juga, lalu tinggal bagaimana kita mengemas nanti kawasan itu menjadi lahan atau jadi tujuan wisata dari berbagai daerah ya utamanya kalau bisa dari luar negeri, saya malah bersyukur. Ibaratnya kawasan ini tinggal mengembangkan, karena kawasan sudah ada jadi secara inti masyarakat di sini kesiapannya memang masih apa adanya, karena belum taulah. Perlu adanya sosialisasi.”¹⁰³

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

Dari pemaparan Bapak Saiful di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata kawasan sudah tersedia wilayahnya karena secara konsep programnya adalah kawasan. Bapak Saiful juga menyebutkan bahwa di dinas sendiri pastinya juga ada sebuah perencanaan dan selanjutnya tugas bersama adalah mengemas kawasan perdesaan tersebut seperti apa yang kita inginkan bersama.

Dengan perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Kedepannya kerjasama antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharapkan lebih terintegrasi untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Disamping itu, pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Nawa Bhakti Satya yang Ke-7 (Jatim Berdaya), yaitu upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan “mendorong pemberdayaan pemerintah desa (restorasi desa) melalui *One Village One Product One Corporate and Agropolitan*”.¹⁰⁴ Dalam arti bahwa desa menjadi subyek pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

¹⁰⁴Buku Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

c) Dukungan kerjasama Tim di DPMD yang saling mendukung.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mendukung program pemerintah, maka DPMD memiliki susunan organisasi yang saling mendukung satu sama lain demi tercapainya program pemerintah Kabupaten Blitar. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Edy:

“Dari rekan-rekan bidang lain juga saling membantu satu sama lain, ya termasuk program Agrominawisata ini. Bidang Pemerintahan Desa dengan kepala seksinya memberikan dukungan melalui penataan dan pembinaan aparatur pemerintah desa, APBDes, dan juga data dan informasi desa. Sementara di Bidang Kelembagaan Masyarakat juga membantu melalui pembinaan kelembagaan yang ada di desa baik itu dari ibu PKK, karang taruna dan yang lainnya. Dan di Bidang pembangunan Desa juga dibantu oleh kepala seksi yang lain dari segi pemberdayaan Lembaga ekonomi maupun TTG. Hal ini biasa dibahas dalam rapat rutin DPMD yang biasanya dipimpin langsung oleh Kepala Dinas maupun Sekretaris Dinas.”¹⁰⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam hal pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan kegiatan yang diampu oleh Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Nasruddin:

“Dari DPMD sudah ada bentuk kerjasama dengan instansi terkait, dulu juga dibina suruh membuat Perdes (peraturan desa) terkait Agrominawisata. Dari DPMD itu sering datang ke sini mengadakan ya monev perkembangan DD ADD dari Inspektorat juga, dari Dinas Pariwisata juga sering ke sini. Sifatnya mengadakan pembinaan pada perangkat khususnya dan pada masyarakat pada umumnya tentang kinerja.”¹⁰⁶

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

Dari pemaparan dari Bapak Nasruddin di atas dapat kita ketahui bahwa DPMD sering datang ke Desa Kemloko dengan tujuan monev (Monitoring dan Evaluasi) mengenai DD (Dana Desa) dan juga ADD (Alokasi Dana Desa) yang dilakukan oleh Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa. Selain itu juga ada Seksi Administrasi Pemerintahan Desa yang melakukan pembinaan kepada perangkat tentang kinerja. Dalam hal ini Bapak Saiful Mujab menambahkan pernyataannya:

“Sejauh yang saya tahu memang dinasnya itu sepertinya semangat dan kompak dalam pembangunan ini, makanya kita sebagai BUMDESMA akan mengkoordinasikannya lebih lanjut agar berjalan lancar dan maksimal.”¹⁰⁷

Berdasarkan pemaparan Bapak Saiful di atas dapat kita ketahui bahwa sebagai BUMDESMA, Bapak Saiful menilai bahwa DPMD kompak dalam membangun Kawasan Perdesaan Agrominawisata, sehingga menjadikan pengurus BUMDESMA Bumi Penataran akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut supaya program berjalan lancar dan maksimal.

Keterkaitan Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sangat erat dengan seksi yang lain di DPMD. Bidang Pemerintahan Desa memiliki banyak program dan kegiatan yang bisa membantu mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang mendukung dari sistem penataan desa, dengan desa yang mandiri dan tertata maka akan sangat mempengaruhi dalam proses pembangunan kawasan perdesaan karena berbasis komunitas desa.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

2) Eksternal

a) Antusias Pemerintah Desa dan Kecamatan .

Antusias dari masyarakat, pemerintah desa, maupun kecamatan merupakan sebuah bukti dukungan yang sangat kuat. Karena pembangunan kawasan ini mustahil jika hanya DPMD yang bergerak tanpa adanya dukungan dari bawah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudhi:

“Antusias pemerintah desa dan juga kecamatan dalam pembangunan kawasan ini terbukti dari 22 kecamatan yang kita berikan sebaran formulir untuk pengusulan Kawasan Perdesaan itu ada sekitar 20 lebih yang mengumpulkan kembali usulan-usulan Kawasan Perdesaan. Namun begitu kita buat skala prioritas karena pembangunan kawasan perdesaan ini butuh pilot project berdasarkan skala prioritas. Jadi dari 20 lebih usulan itu kita prioritaskan yang mana dulu yang kita bentuk. Hal tersebut tentu saja berhubungan dengan pertimbangan dari aspek potensi di desa maupun potensi kawasan yang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Kemudian karena amanat dari Peraturan Menteri Desa PDTT bahwa Kawasan Perdesaan itu harus bercorak agraris artinya berbasis pertanian. Hal tersebut senada dengan kondisi geografis Kabupaten Blitar yang separuh wilayahnya bercorak agraris, artinya kita bisa masuk ke zona pertanian entah itu nanti pertanian digabungkan dengan industri yang mana ada kawasan agroindustri, kemudian pertanian wisata dan perikanan kita gabungkan menjadi agrominawisata, kemudian kawasan pertanian terpadu, kemudian kawasan ecowisata, artinya bahwa pertanian itu menjadi basis dalam pengembangan Kawasan perdesaan di Kabupaten Blitar.”¹⁰⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah desa dan juga kecamatan begitu antusias dalam menyambut pembangunan kawasan perdesaan. Dari 22 kecamatan hampir semua mengusulkan pembangunan kawasan perdesaan di kecamatan masing-masing. Begitu juga

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

Kecamatan Nglegok dan pemerintah desa yang telah berhasil mengusulkan kawasan perdesaan yang sekarang menjadi kawasan perdesaan Agrominawisata. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan Nglegok beserta desa yang tergabung dalam kawasan agrominawisata menindaklanjutinya dengan berbagai upaya yaitu dengan pengembangan komoditas unggulan masing-masing desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumari:

“Upaya yang telah kami lakukan dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Nglegok yaitu memperbaiki infrastruktur dan fasilitas untuk menuju kawasan tersebut, seperti memperbaiki jalan raya yang rusak untuk memudahkan diakses oleh pengunjung. Membantu mempromosikan Agrominawisata tersebut melalui media sosial baik didalam Blitar maupun masyarakat luar Blitar. Karena saat ini sosial media merupakan alat tercepat dan termudah untuk mempromosikan sesuatu hal.”¹⁰⁹

Berdasarkan pemaparan bapak Sumari di atas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Nglegok mendukung pembangunan kawasan perdesaan agrominawisata dari segi pembangunan fasilitas akses menuju kawasan agrominawisata dan promosi melalui sosial media.

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Tokoh-tokoh di situ punya ide, masyarakat dulunya juga tidak begitu respon, bagaimana kita merespon dari situ, membantu juga bagaimana supaya tahu. Kadang-kadang mereka dikasi penjelasan ini kan cuma sepotong-potong akhirnya nggak begitu tertarik akhirnya kita membantu penjelasan seperti ini dan lain sebagainya, lalu mereka paham.”

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

Alhamdulillah satu RW lah. Di sini satu RW itu sekitar 350 KK. Di situ nanti kita ada homestay, ada outbound, trus ada camping ground dsb, nanti untuk edukasi seperti itu. Kita siapkan itu di tanah-tanah desa.”¹¹⁰

Berdasarkan pemaparan bapak Budi di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Sumberasri sangat antusias dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan mempersiapkan beberapa hal yang mendorong potensi wisatanya yaitu dengan membangun homestay, outbound, dan juga playground. Berbagai upaya tersebut merupakan wujud dari antusias pemerintah Desa dan juga masyarakat dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Pokdarwis di sini sudah maju, kalau ada KKN kita sudah kerjasama dengan UMM dan UnBraw dan banyak dari mahasiswa yang datang ke Desa Kemloko untuk belajar edukasi ternak koi dan kesenian, gula kelapa, dll. Kita jadikan agenda tahunan untuk kita keluarkan produk UMKM unggulan Desa Kemloko khususnya dan Kecamatan Nglegok pada umumnya pad hari ulang tahun Desa Kemloko. Hari jadi yang kemarin 164 tahun Desa Kemloko, 164 hari jadi desa kemloko dimulai dari lurah pertama Tjodikoro dan seterusnya sampai rumpun yang ke-9. Dilapangan kemarin dilaksanakan dengan masyarakat Desa Kemloko dan juga kerjasama dengan ISI Universitas Seni Surakarta.”¹¹¹

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Kemloko sangat antusias dalam meningkatkan komoditas unggulan dan juga penataan dari segi pariwisatanya. Desa Kemloko bahkan juga bekerjasama dengan berbagai universitas seperti halnya UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), UnBraw (Universitas Brawijaya), dan juga ISI (Institut Seni Indonesia).

Dengan berbagai wujud antusias Pemerintah Desa dan juga Kecamatan di atas maka merupakan sebuah dukungan untuk mendorong proses pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Karena bagaimanapun juga pembangunan ini tidak hanya Dinas dan pemerintah daerah yang terus bergerak, tetapi pemerintahan desa dan juga masyarakat harus menyambut baik dengan upaya-upaya yang positif.

b) Banyaknya Potensi Lokal

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kecamatan Nglegok sangat bervariasi dan bermacam-macam sehingga dalam pembangunan kawasan perdesaan, potensi lokal diklasifikasikan menjadi 3 Klaster yaitu agro (pertanian), mina (perikanan), dan wisata. Dalam hal ini Bapak Edy Setiono selaku Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD menyampaikan bahwa:

“Desa yang paling unggul dari masing-masing klaster Agro, mina, dan wisata yaitu Klaster agro perkebunan lebih banyak terdapat di Desa Sumberasri, Desa Modangan, dan Desa Kedawung yang merupakan desa penghasil buah-buahan antara lain durian, nanas, manggis, dan alpukat. Klaster Mina perikanan lebih banyak terdapat di Desa Kemloko, desa Ngoran, dan Desa Penataran dimana sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha budidaya ikan koi.

Klaster Pariwisata lebih terdapat di Desa Penataran dengan wisata Candi Penataran, Desa Sumberasri dengan tempat wisata Bukit Teletubbies, sedangkan di Desa Modangan terdapat wisata perkebunan Karanganyar.”¹¹²

Dalam hal ini peneliti mengambil satu desa sebagai keterwakilan dari masing-masing klaster potensi yaitu Desa Sumberasri sebagai keterwakilan klaster agro, Desa Kemloko sebagai keterwakilan klaster perikanan, dan Desa Penataran sebagai klaster wisata.

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri jugap menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Di sini selain kita menyiapkan lahan dan tempat-tempat wisata, kita melihat potensi yang ada durian di lokasi itu sudah sangat luar biasa. Kemarin kuta pendataan terakhir itu terdapat 4623 batang pohon dalam satu kawasan Omah Duren. Di situ kita juga mendata untuk varietasnya 3 varietas yang besar-besar itu, selain itu ada durian-durian unggulan lokal seperti badugul.”¹¹³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Sumberasri sebagai perwakilan desa dari klaster agro telah mempersiapkan banyak hal yaitu meningkatkan potensi unggulan Desa Sumberasri yaitu Durian dengan melakukan pendataan pada pohon durian agar tetap terkontrol kondisi dan keadaannya.

¹¹²Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Karena penduduk Desa Kemloko ini mayoritas Petani, ya kita usahakan disamping menanam padi karena airnya mudah, bawahnya ini untuk ternak ikan, untuk nebar bibit (Minapadi). Kalau di Dusun Kuwut banyak yang ternak ikan, sentra Koi itu ada di Dusun Kuwut mayoritas penduduk peternak koi. Di sana juga ada kelompok tani ikan di 2 tempat, Kuwut utara dan Kuwut selatan.”¹¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Kemloko sebagai perwakilan Desa dari klaster mina telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung potensi unggulannya yaitu ikan koi seperti dengan sebuah inovasi minapadi yaitu menanam padi dan ikan secara bersamaan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan air di Desa Kemloko sangat melimpah sehingga sangat mudah dalam mencari keperluan air.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Kita potensi banyak juga, kita punya ikon wisata, ikan ada, koi ada, ikan hias kecil dan dari respon masyarakat juga mendukung bahkan menunggu konsepnya bagaimana.”¹¹⁵

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Ambar di atas dapat kita ketahui bahwa Desa penataran memiliki beberapa potensi diantaranya yaitu ikan hias,

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

ikan koi, ikan hias kecil, dan juga yang menjadi unggulan adalah ikon wisatanya yang lumayan banyak

Potensi lokal SDA maupun non SDA dapat dikembangkan menjadi basis inovasi desa, potensi keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat perdesaan yang dapat dilestarikan sebagai wahana membangun karakter desa masyarakatnya, potensi kelembagaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi modal sosial pembangunan, potensi lembaga ekonomi desa sebagai lokomotif perekonomian desa, dan potensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

c) Adanya Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinamika perubahan kehidupan masyarakat telah berubah dan berkembang dengan pesat. Dampak adanya globalisasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi yang memberikan layanan kemudahan kebutuhan hidup sehari-hari. Hadirnya kemajuan teknologi menggantikan cara-cara yang lama dengan cara-cara yang baru yang lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi digital (komunikasi dan informasi berbasis jaringan) yang semakin masif dalam kehidupan masyarakat memberikan banyak kemudahan sehingga kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya dapat diakses secara manual tetapi juga dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi dan sistem informasi digital. Dalam hal ini Bapak Yudhi memberikan pendapat yaitu:

“Kami berharap agar pembangunan Kawasan perdesaan Agrominawisata ini mampu memberikan kontribusi

yang positif kepada masyarakat. Apalagi pada zaman yang serba canggih ini kan memudahkan kita dalam berbagai hal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan kawasan ini baik dari segi operasional maupun dari promosi. Selain itu dari DPMD juga mempunyai Seksi Data dan Sistem Informasi Desa yang terus membina desa untuk terus mengupload keadaan desa kedalam sistem ini. Dengan digiatkannya Desa dalam jaringan membuat pemerintahan desa juga semakin dimudahkan. Dengan demikian masyarakat secara luas dapat mengakses informasi tentang desa tersebut.”¹¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi diharapkan mampu mendorong pembangunan kawasan agrominawisata. Baik dari segi operasional maupun dari segi promosi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Demikian juga DPMD juga membina desa-desa melalui seksi perkembangan data dan sistem informasi desa, hal ini akan membuat desa-desa di kabupaten Blitar dapat mengupload profil desa agar masyarakat semakin mudah dalam melihat informasi maupun potensi yang ada di desa, terutama desa-desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan agrominawisata. Dalam hal ini Bapak Sumari menambahkan:

“Cara pengembangan komoditas unggulan yaitu dengan memperkenalkan keunggulan tersebut kepada siapapun pengunjung yang datang di daerah Agrominawisata, mengenalkan dan menyebarkan melalui media cetak maupun internet serta mengikutsertakan kegiatan pameran demi mengenalkan diri kepada masyarakat luas.”¹¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Nglebok untuk mengembangkan

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglebok pada tanggal 2 September 2019

komoditas unggulan yaitu dengan memperkenalkan keunggulan tersebut kepada siapapun pengunjung yang datang di daerah Agrominawisata, mengenalkan dan menyebarkan melalui media cetak maupun internet serta mengikutsertakan kegiatan pameran untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Cara tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pembangunan Kawasan perdesaan Agrominawisata.

Pemerintah desa perwakilan desa dari klaster agro yaitu Desa Sumberasri juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono:

“Masyarakat Sumberasri memang sudah dari dulu sangat kompak, makanya kita memakai slogan Sumberasri itu ada di logo ada namanya Kampung Segoro. Kampung segoro itu selain memang sebuah lembaga pemberdayaan masyarakatada nanti kalau dibrowsing, awalnya dulu juga mengangkat tentang buruh migran ibarat seperti TKI TKW supaya setelah pulang tidak ada lagi harapan untuk berangkat kembali karena kita ada pemberdayaan disitu. Namanya kampung segoro segoro itu singkatan dari semangat gotong royong.”¹¹⁸

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Sumberasri dalam hal pemberdayaan masyarakatnya yang menjadi buruh migran agar tidak berangkat kembali setelah diberdayakan oleh sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat yang bernama kampung segoro, segoro itu sendiri merupakan singkatan dari semangat gotong-royong. Pemberdayaan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

tersebut juga telah memanfaatkan sebuah teknologi informasi untuk sebagai dokumentasi maupun publikasi programnya.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Pernah dulu waktu pembentukan kepengurusan itu DPMD datang ke sini kalau hubungannya Agrominawisata itu sekitar 2 kali. Dari Diskominfo juga pernah terkait dengan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), jadi perkembangan Desa Kemloko ini bisa dilihat di google map dan blognya Desa Kemloko.”¹¹⁹

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Kemloko dalam perkembangan desanya telah menggunakan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang berguna untuk mengekspos kekayaan maupun potensi Desa Kemloko salah satunya adalah potensi perikanan yang mendukung Agrominawisata.

Kemajuan teknologi informasi tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata seperti halnya dalam hal publikasi yang mampu memangkas biaya cetak dan lebih tersampaikan secara luas dan cepat sehingga masyarakat luas dapat mengakses data dan informasi mengenai Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Demikian dengan transportasi semakin dipermudah oleh adanya kendaraan komersial yang dapat diakses juga melalui jaringan internet yaitu dengan aplikasi ojek online.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

b. Faktor Penghambat

Didalam sebuah melaksanakan sebuah program pasti terdapat sebuah faktor pendukung dan penghambatnya, seperti yang dialami DPMD dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang mempunyai faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun eksternal. Maka adapun faktor penghambatnya dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1) Internal

- a) RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) yang Dihasilkan TKPKP Belum Masuk Renstra (Rencana Strategis) Masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) para Stakeholder.

Dalam pengembangan Kawasan perdesaan itu ada 2 hal, yang pertama TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan). TKPKP ini berkedudukan yang pertama di Kabupaten yang kedua di kawasan perdesaan tersebut. Berdasarkan SK Bupati Blitar tentang pembentukan TKPKP, TKPKP tersebut terdiri dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yang mana ketuanya adalah Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) kemudian sekretarisnya adalah DPMD dan anggotanya adalah OPD-OPD yang saling terkait dalam suatu kawasan tersebut. Dalam hal ini Bapak Yudhi memberikan pendapatnya:

“TKPKP yang menghasilkan RPKP dimana setiap kawasan itu punya RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) itu belum masuk ke masing-masing Renstra OPD terkait sehingga sulit untuk mengeksekusi. Karena bagaimanapun juga ketika OPD terkait harus mengeksekusi pembangunan Kawasan Perdesaan maka di dokumen perencanaannya harus memiliki tema kawasan perdesaan

juga. Hal inilah yang belum bisa dilakukan, namun kedepannya akan kita sinkronisasi."¹²⁰

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dari setiap TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan) harus menghasilkan RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) yang masuk ke masing-masing Renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait sehingga sulit untuk mengeksekusi bersama. Karena ketika OPD terkait akan mengeksekusi kawasan perdesaan harus mencantumkan tema kawasan perdesaan dalam dokumen perencanaan. Hal ini merupakan faktor yang menghambat dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata, akan tetapi kedepannya akan disinkronisasi dengan OPD terkait.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

*"Pendampingan dari OPD terkait saya rasa belum begitu ada yang terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini. Hanya saja kita masih disuruh membuat Perdes dan lembaga-lembaga yang mendukung program ini. Sepertinya dari dinas-dinas itu masih kurang kompak entah belum direncanakan atau sudah tetapi belum dilaksanakan."*¹²¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang saling terkait dalam Agrominawisata ini pendampingannya belum ada. Dari DPMD sendiri sudah melakukan pembinaan pembuatan Perdes dan juga kelembagaan. Sepertinya dari dinas-

¹²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

dinas itu masih kurang kompak dalam membina program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Terkait TKPKP itu memang kalau di Kawasan Perdesaan Agrominawisata belum berjalan maksimal seperti di lokasi kawasan perdesaan yang lainnya, sehingga hal terkait perencanaan yang dihasilkan juga belum begitu jelas seperti apa yang diinginkan, serta respon dinas-dinas terkait juga belum begitu muncul.”¹²²

Dari pemaparan di atas Bapak Saiful selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran dapat kita ketahui bahwa TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan) Agrominawisata yang ada di Kecamatan Nglegok ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dikarenakan memang masih baru sehingga terkait perencanaan termasuk RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) juga belum dihasilkan dan juga respon dinas-dinas terkait juga belum begitu muncul.

RPKP belum masuk ke dalam Renstra (Rencana Strategis) dinas terkait karena Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Blitar tergolong program yang baru sedangkan Renstra sendiri disusun setiap 5 tahun, sehingga untuk memasukkan Pembangunan Kawasan Perdesaan kedalam perencanaan perlu berkoordinasi dengan beberapa dinas yang terkait tersebut.

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

b) Kurangnya Koordinasi antar Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak terkait yang memiliki keterkaitan maupun kesamaan kepentingan dalam suatu program. Dalam hal ini peran stakeholder juga sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

DPMD dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, maupun OPD terkait, hingga Pemerintah Daerah Provinsi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edy Setiono selaku Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

“Pembangunan Agrominawisata melakukan Kerjasama dengan beberapa OPD yang tertuang dalam matrik Peraturan Bupati antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas pariwisata budaya pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan BAPPEDA.”¹²³

Dari pernyataan di atas bahwa DPMD menjalin kerjasama dengan para stakeholder yang memiliki kapasitas dan tupoksi dalam upaya sinergitas potensi agrominawisata. Dengan terjalin kerjasama ini apabila masyarakat maupun kelembagaan yang terdapat di Kawasan Perdesaan Agrominawisata memiliki keluhan ataupun masalah terkait dengan klaster dan potensi masing-masing desa.

Sementara Bapak Sumari selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglepok menyampaikan sebagai berikut:

¹²³Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

“Sektor pariwisata di Kecamatan Nglegok memerlukan strategi pengembangan pariwisata yang terencana dengan melibatkan berbagai stakeholder dari kedinasan yang lain. Dengan keterlibatan stakeholder lainnya maka pengembangan strategi pariwisata bisa lebih strategis dan bersifat jangka panjang.”¹²⁴

Dari pernyataan Bapak Sumari di atas dapat diketahui bahwa sektor pariwisata di Kecamatan Nglegok memerlukan strategi pengembangan pariwisata yang terencana dengan melibatkan berbagai stakeholder dari kedinasan yang lain, dengan keterlibatan stakeholder lainnya maka pengembangan strategi pariwisata bisa lebih strategis dan bersifat jangka panjang.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh DPMD juga telah banyak yang telah diselesaikan, namun sementara ini DPMD dirasakan masih kurang dalam melakukan koordinasi dengan para stakeholder sehingga respon beberapa stakeholder juga belum begitu terlihat. Dalam hal ini Bapak Edy Setiono menambahkan pendapatnya :

“Proses pembangunan ini belum sesuai, karena dari beberapa OPD belum terlihat keterlibatannya dalam anggaran untuk mendukung kawasan tersebut.”¹²⁵

Dari pernyataan Bapak Edy di atas menyebutkan bahwa peran beberapa stakeholder yaitu dari beberapa OPD keterlibatannya dalam anggaran belum terlibat untuk mendukung kawasan Agrominawisata tersebut.

¹²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

¹²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

Dalam hal ini Pemerintah Desa Kemloko selaku keterwakilan desa dari klaster mina yaitu Bapak Haris menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dengan desa lain Agrominawisata ya sementara ini sudah terbentuk kepengurusan dari 7 desa ini tapi untuk koordinasi masih kurang. Sebetulnya koordinasi yang sangat kita butuhkan.”¹²⁶

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Kemloko yaitu koordinasi dengan desa-desa yang tergabung dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata namun perlu adanya sebuah perantara yang mempertemukan antara desa-desa tersebut guna untuk membahas secara intensif tentang Agrominawisata.

Di sisi lain Bapak wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran berpendapat sebagai berikut:

“Solusi dari pendukung dan penghambatnya ya harus bertemu antara masyarakat dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kabupaten harus sinkron, harus bertemu dan musyawarah biar satu misi. Sebenarnya masyarakat itu sangat diuntungkan kalau ada pembangunan. Itu yang pasti akan sangat ramai wisata kita, pendapatan masyarakat kan juga lebih bagus.”¹²⁷

Dari pendapat yang disampaikan oleh bapak Wahru diatas dapat diketahui bahwa solusi dari penghambat diatas adalah dengan cara bertemu antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten harus sinkron harus bertemu dan musyawarah biar satu misi. Bapak Wahru juga berpendapat bahwa sebenarnya masyarakat itu sangat diuntungkan kalau ada

¹²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

¹²⁷Hasil wawancara dengan Bapak wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran pada tanggal 28 September 2019

pembangunan. Itu yang pasti akan sangat ramai wisata di Kecamatan Nglegok dan pendapatan masyarakat kan juga lebih bagus.

c) Kurangnya Dana Khusus untuk Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan merupakan sebuah kawasan yang terhimpun dari beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi dan memiliki tujuan bersama untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Pendanaan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ada di Kabupaten Blitar ini adalah dengan swadaya desa-desa yang tergabung dalam suatu kawasan perdesaan tersebut.

Seperti halnya Kawasan Perdesaan Agrominawisata yang masih dalam tahap awal yaitu tahap pengembangan yang pendanaannya dari daru swadaya yaitu dari penganggaran APBDes masing-masing desa karena pada dasarnya kawasan perdesaan merupakan kawasan yang berbasis komunitas desa. Selanjutnya setelah terlihat potensi dari kawasan perdesaan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten melalui DPMD akan membantu mengajukan bantuan pendanaan agar pengembangan kawasan perdesaan dapat berkembang lebih lanjut.

DPMD melalui Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan memiliki anggaran yang cukup terbatas sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA RKPD DPMD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), selain itu dana tersebut juga digunakan untuk fasilitasi kegiatan pengembangan 4 (empat) Kawasan Perdesaan yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Setiono:

“Terkait masalah pendanaan dalam Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok ini, pada

awalnya kita arahkan melalui penyertaan modal dari desa-desa yang dituangkan dalam APBDes desa masing-masing sebanyak 7 desa yaitu minimal dan rata-rata sebesar lima juta rupiah dan ada juga yang lebih. Total nominal gabungan penyertaan modal dari masing-masing desa memang bisa dibbilang masih tergolong sedikit, tetapi dana tersebut bisa digunakan untuk internal Kawasan Perdesaan Agrominawisata sendiri, sementara untuk kegiatan yang sifatnya pembinaan dan koordinasi kita fasilitasi melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) kegiatan pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan, dan selanjutnya kalau sudah berkembang akan kita dampingi dalam mengajukan bantuan pendanaan.”¹²⁸

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Edy diatas dapat kita ketahui bahwa memang tidak ada dana khusus yang ditujukan untuk operasional pada suatu Kawasan Perdesaan salah satunya Kawasan Perdesaan Agrominawisata, hal ini memang sebuah hambatan ditambah program ini merupakan sebuah hal yang baru sehingga banyak menimbulkan keraguan.

Menurut Pemerintah Kecamatan Nglekok yaitu Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nglekok yaitu sebagai berikut:

“Dana yang terbatas sehingga tidak maksimal dalam membantu mengembangkan Agrominawisata. Karena tidak dipungkiri bahwa dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam melakukan program-programnya yang telah dirancang.”¹²⁹

Dari pendapat Bapak Sumari di atas dapat diketahui bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata

¹²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

¹²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglekok pada tanggal 2 September 2019

masih terbatas sehingga tidak maksimal dalam membantu mengembangkan Agrominawisata.

Sementara itu pemerintah desa perwakilan desa dari klaster wisata yaitu Desa Penataran juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ambar:

“Kembali ke strategi ya, karena konsepnya saja belum jelas, jadi sebetulnya hambatannya dana. Hambatan-hambatan yang kita temui apa juga belum jelas, karena arah kita itu mau kemana. Cuma kalau detik ini saya kira penghambatnya belum muncul, Perdes sudah ada, yang kita butuhkan sekarang action.”¹³⁰

Berdasarkan pemaparan Bapak Ambar di atas dapat kita ketahui bahwa Desa Penataran merasa hal yang menghambat dalam pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata adalah dana, sedangkan hambatan-hambatan yang lain belum ditemui, cuma yang dibutuhkan adalah aksi yang nyata.

Dilain sisi menurut pandangan tokoh desa yaitu Bapak Wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran yaitu:

“Faktor penghambatnya ya dana pastinya, sama tokoh-tokohnya yang kurang bergerak. Kalau dari pemuda-pemuda ya cuma rame saja di medsos gerakanya kurang.”¹³¹

Dari pendapat yang disampaikan Bapak Wahru di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat yaitu adalah faktor Dana. karena tidak dipungkiri bahwa dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam melakukan program-programnya yang

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran pada tanggal 28 September 2019

telah dirancang dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Program dari Agrominawisata ini sebenarnya program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat utamanya untuk peningkatan ekonomi, saya kira dengan kepentingan masyarakat yang begitu penting, kebutuhan yang semakin hari semakin mendesak dengan kawasan yang sudah ada, ikan koinya sudah ada. Pemerintahlah yang seharusnya semangat atau memberikan dukungan yang lebih besar, tidak hanya program saja. Saya kira ada pendekatan-pendekatan lain mungkin melalui dana dan sebagainya, karena kalau di dukung dari penyertaan modal dari desa-desa saya kira masih jauhlah karena kalau saya lihat pembentukan kawasan ini biayanya sangat besar. Sedangkan dari desa itu penyertaan minimal 5 Juta, dari 7 desa Cuma dapat 35 juta, minimal memberikan anggaran.”¹³²

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Saiful di atas dapat kita ketahui bahwa program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini merupakan sebuah program yang besar dan manfaatnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Bapak Saiful seharusnya pemerintah yang seharusnya memberikan dukungan yang lebih besar karena kawasan ini memerlukan dana yang cukup besar yang kurang jika mengandalkan dari penyertaan modal dari masing-masing desa, seharusnya pemerintah mendukung penuh minimal dengan memberikan anggaran.

Dari beberapa pendapat yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa dana merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam pembangunan

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Mayoritas berpendapat bahwa perlu adanya sebuah dana khusus untuk kawasan perdesaan agrominawisata ini karena memerlukan dana yang cukup besar yang kurang jika mengandalkan dari penyertaan modal dari masing-masing desa.

2) Eksternal

a) SDM dan Sosialisasi kepada Masyarakat yang Masih Kurang.

Kabupaten Blitar memiliki desa-desa yang berpotensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pembangunan berbasis kader desa. SDM merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan sesuatu karena SDM merupakan promotor dalam sebuah tujuan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nglegok :

“Meskipun memiliki SDM yang trampil dan kreatif namun ada beberapa orang yang masih mempunyai pemikiran awam yang menjadi penghambat untuk berkontribusi bersama mengembangkan Kawasan Agrominawisata.”¹³³

Menurut apa yang disampaikan oleh bapak Sumari diatas, tingkat SDM yang tidak merata merupakan salah satu hal yang menghambat untuk berkontribusi bersama mengembangkan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Dari keterwakilan klaster agro (pertanian) yaitu Desa Sumberasri, menurut Bapak Budi Kuantono selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintahan Desa Sumberasri sebagai berikut :

¹³³Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

“Dulu penghambatnya masih banyak terutama air, SDM (Sumber Daya Manusia). Alhamdulillah saat ini sudah terjawab.”¹³⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut Bapak Budi Kuantono faktor penghambatnya di Desa Sumberasri adalah kekurangan air karena lokasi di lereng gunung yang terkadang kesulitan ketersediaan air bersih dan SDM yang perlu adanya pembinaan dari desa namun kekurangan tersebut sudah terjawab oleh program pembinaan dari Desa Sumberasri.

Di sisi lain menurut Bapak Budi selaku Wakil Ketua Pokdarwis Desa Sumberasri sebagai berikut :

“Faktor penghambatnya adalah disini kita masih berinovasi bagaimana nanti durian maupun buah-buahan yang lain itu bisa kita rekayasa genetika, bisa berbuah di awal musim. Jadi disaat misalkan karena durian ini menurut pengalaman yang ada misalkan bulan 7-8 mulai berbunga. Harapan kita nanti bisa berbunga misalkan bulan 6 otomatis nanti disaat waktu panen sekitar biasanya bulan terakhir bulan 12 atau bulan 1 sudah ada untuk durian lokal. Harapan kita nanti bulan 12 atau bulan 11 akhir kita bisa panen. Jadi harga itu masih tinggi, kalau bisa panen di awal musim itu jelas harganya lebih tinggi, cuman kita sudah mengadopsi berbagai informasi kita belajar, kita baru mempraktekkan bagaimana membuahkan di luar musim dengan aneka rekayasa genetika.”¹³⁵

Dari penyampaian Bapak Budi mengemukakan bahwa Desa Sumberasri memiliki faktor penghambat yaitu masih mencoba berinovasi rekayasa genetika agar buah dapat berbuah dan panen diluar musimnya sehingga mampu meningkatkan harga jual. Hal ini merupakan faktor

¹³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

¹³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Wakil Ketua Pokdarwis Desa Sumberasri pada tanggal 28 September 2019

penghambat yang berkaitan dengan SDM tetapi sudah mampu berkembang dan perlu tambahan kemampuan dalam merekayasa pertumbuhan buah.

Dari keterwakilan klaster mina (perikanan) yaitu Desa Kemloko, menurut Bapak Nasruddin Abdul Haris selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko sebagai berikut :

“Sedangkan faktor penghambatnya adalah penyakit, penyakit ikan koi ini perlu ada pelatihan terus, kalau pemasaran alhamdulillah sudah lewat online ini pemuda-pemuda Desa Kemloko itu bisa. Memang perlu pelatihan dan pembuatan pakan ternak pelet. Jadi hambatannya sementara di Desa Kemloko belum adanya pelatihan yang memadai, dengan banyaknya peternak tapi belum memadai untuk pelatihan agar pakan bisa produksi sendiri.”¹³⁶

Menurut penyampaian bapak Nasruddin di atas hal yang menghambat pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata adalah perlunya pelatihan untuk penambahan kualitas peternak dalam menangani penyakit pada ikan koi dan kurangnya pelatihan tentang pembuatan pakan ternak pelet ikan. Hal ini juga menyangkut tentang kurangnya kemampuan SDM dalam menyediakan pakan secara mandiri karena Desa Kemloko merupakan desa yang termasuk dalam klaster perikanan sehingga perlu adanya peningkatan SDM.

Di sisi lain menurut Bapak Saiful Mujab selaku pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok sebagai berikut:

“Hambatannya itu tadi karena mungkin terlalu minim informasi yang masuk ke masyarakat, jadi kita belum

¹³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

bisa mendorong supaya masyarakat bisa berpartisipasi untuk kegiatan ini.”¹³⁷

Dari pernyataan Bapak Saiful Mujab diatas mengemukakan bahwa faktor penghambat yang dialami di Desa Kemloko adalah minimnya informasi yang masuk ke masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Dalam menangani hal ini maka diperlukan adanya penambahan SDM pengurus pokdarwis dalam memberikan sebuah informasi agar dapat diketahui masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bahu membahu mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata.

Dari keterwakilan klaster wisata yaitu Desa Penataran, menurut Bapak Ambar selaku Sekretaris Desa Penataran sebagai berikut:

“Sedangkan faktor penghambatnya saya kira kita masih perlu pembinaan wawasan.”¹³⁸

Berdasarkan penyampaian oleh bapak Ambar secara singkat diatas menunjukkan bahwa pihak desa juga masih memerlukan adanya pembinaan dan penambahan wawasan agar terciptanya kesamaan pemahaman. Jika dilihat dari potensi wisata di Desa Penataran memang sudah sejak dahulu kala Desa Penataran ini menjadi pusat pariwisata di Kabupaten Blitar, tetapi dalam menyongsong bersama pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini Pemerintah Desa Penataran perlu tambahan pembinaan dan penambahan

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglekok pada tanggal 8 Desember 2019

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar sebagai Sekretaris Desa Penataran pada tanggal 30 Agustus 2019

wawasan karena dalam hal ini merupakan pembangunan pariwisata dalam lingkup besar yang berbasis komunitas desa.

Disisi lain Bapak Wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran menambahkan sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya ya tokoh-tokohnya kurang bergerak kalau pemuda-pemuda ya cuma rame saja di medsos gerakanya kurang.”¹³⁹

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Bapak Wahru Rozi bahwa bapak Wahru sebagai salah satu tokoh Desa Penataran merasakan bahwa tokoh-tokoh desa yang lain kurang kompak dalam bergerak mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata sehingga mengakibatkan kurang bergerak atau kurang kompak. Begitupun seperti yang disampaikan bapak Wahru juga bahwa pemuda-pemuda kurang bergerak, hal ini merupakan suatu fenomena bahwa para tokoh desa dan ara pemuda di Desa Penataran sebagai keterwakilan klaster wisata memerlukan pembinaan dan penambahan wawasan untuk meningkatkan SDM sehingga terjadinya suatu kesamaan semangat tujuan membangun Kawasan Perdesaan Agrominawisata dan dapat memberikan kontribusi berupa kesejahteraan bagi masyarakat.

- b) Dari Sisi Perencanaan Pemerintah Desa Belum Memasukkan Isu Kawasan Perdesaan ke Dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) maupun RKPDes (Rencana Kerja Perangkat Desa).

¹³⁹Hasil wawancara dengan Bapak wahru selaku Pokdarwis dan Ketua RT 1 RW 7 Tokoh Masyarakat Desa Penataran pada tanggal 28 September 2019

Dalam perencanaan, isu Kawasan Perdesaan perlu dicantumkan dalam perencanaan tersebut agar mendapat tindak lanjut perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Bapak Yudhi memberikan pendapat:

“Dari sisi perencanaan Pemerintah desa belum memasukkan isu Kawasan Perdesaan itu ke dalam RPJMDesnya maupun RKPDesnya, sehingga tidak nampak dalam APBDesnya karena bagaimanapun juga pembangunan Kawasan Perdesaan itu tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar saja melalui APBDnya, tetapi juga harus melalui pemerintah desa itu juga ikut berperan melalui APBDesnya dan sosialisasi kepada masyarakat itu yang perlu kita benahi. Kemudian karena kurangnya sosialisasi tersebut akhirnya belum sepenuhnya mengetahui maupun memahami.”¹⁴⁰

Menurut pemaparan Bapak Yudhi di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu faktor penghambatnya yaitu belum tercantumnya isu Kawasan Perdesaan dalam perencanaan ke dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) maupun RKPDesnya (Rencana Kerja Perangkat Desa). menurut Bapak Yudhi pembangunan Kawasan Perdesaan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar saja melalui APBDnya, tetapi juga harus melalui Pemerintah Desa itu juga ikut berperan melalui APBDesnya dan sosialisasi kepada masyarakat itu yang perlu dibenahi.

Selanjutnya pemerintah desa perwakilan desa dari klaster mina yaitu Desa Kemloko juga menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin Abdul Haris:

“Memang masyarakat belum banyak yang tahu tentang rencana pembangunan Agrominawisata karena perencanaan desa juga belum begitu intensif membahas

¹⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Prasetyawan Y, SE sebagai Analis Perencanaan Program dan Kegiatan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2019

Agrominawisata. Jadi setidaknya kami punya tahapan untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Desa Kemloko ini nanti bisa dikatakan sebagai suatu kawasan yang berpotensi di bidang perikanan untuk diangkat menjadi Agrominawisata.”¹⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa di Desa Kemloko memang masyarakat belum banyak yang tahu tentang rencana pembangunan Agrominawisata. Hal ini dikarenakan perencanaan di desa juga belum intensif membahas Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Tetapi Pemerintah Desa Kemloko secara bertahap mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di Desa Kemloko ini nanti bisa dikatakan sebagai suatu kawasan yang berpotensi di bidang perikanan untuk diangkat menjadi Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Dalam hal ini Bapak Sumari:

“Solusi untuk strategi dalam perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata adalah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat daerah tersebut dan dalam segi kualitas pengembangan potensi pariwisatanya, pemerintah daerah belum secara optimal khususnya terkait dengan infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi pariwisata. Sektor pariwisata di Kecamatan Nglegok memerlukan strategi pengembangan pariwisata yang terencana dengan melibatkan berbagai stakeholder dari kedinasan yang lain. Dengan keterlibatan stakeholder lainnya maka Pemerintah Desa dan pengembang strategi pariwisata bisa merencanakan lebih strategis dan bersifat jangka panjang.”¹⁴²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa solusi strategi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata

¹⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Abdul Haris Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kemloko pada tanggal 2 September 2019

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat daerah kawasan perdesaan. Di samping demikian, pemerintah daerah belum secara optimal terkait infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi pariwisata. Perencanaan di tingkat desa juga perlu secara jelas dan keterlibatan dinas terkait juga diperlukan untuk pengembangan demi rencana yang lebih strategis dan bersifat jangka panjang.

Terkait dalam pendanaan memang sudah dianggarkan sebesar Rp. 5 Juta sebagai modal awal yang diambilkan dari APBDes. Akan tetapi isu kawasan perdesaan perlu dimasukkan ke dalam perencanaan yang lebih jauh ke depan karena merupakan harapan masa depan bagi desa tersebut,

c) Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Keberhasilan suatu program merupakan perpaduan antara banyak faktor salah satunya yaitu sarana dan prasarana. Kalau hal ini memiliki kekurangan tentu akan mempengaruhi proses kelancaran suatu program yang dalam hal ini adalah pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan mendasar yang keberadaannya sangat diperlukan dan sejauh ini Kawasan Perdesaan Agrominawisata masih memiliki sarana dan prasarana yang masih minim. Dalam hal ini Bapak Edy menyampaikan pendapatnya:

“Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini karena lokasinya terletak dikaki Gunung Kelud juga, jadi akses jalan juga masih perlu dibenahi terkait sarana prasarana memang perlu perhatian khusus yang merupakan penghambat juga. Hal ini perlu kita koordinasikan dengan terkait agar segera ditinjau lanjuti karena bagaimanapun juga Program Kawasan

*Perdesaan Agrominawisata ini merupakan program prioritas yang merupakan Misi Bupati Blitar yang ke-6.*¹⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa letak Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini sebagian di kaki Gunung Kelud yang biasanya sarana menuju lokasi atau akses jalan sering mengalami kerusakan. Hal ini juga merupakan suatu penghambat karena pengunjung pastinya akan mempertimbangkan juga kenyamanan akses jalan dan sarana menuju lokasi. Kedepannya DPMD akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan dinas terkait agar segera ditindaklanjuti karena pembangunan kawasan perdesaan merupakan program prioritas Kabupaten Blitar yang tertuang dalam misi ke-6 Bupati Blitar tahun 2016-2021.

Pendapat menurut Pemerintah Kecamatan Nglegok yaitu Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nglegok yaitu sebagai berikut:

*“Solusi untuk strategi dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perdesaan Agrominawisata adalah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat daerah tersebut dan dalam segi kualitas pengembangan potensi pariwisatanya, pemerintah daerah belum secara optimal khususnya terkait infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi pariwisata.”*¹⁴⁴

Dari pendapat Bapak Sumari di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah belum secara optimal khususnya terkait infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi pariwisata.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Setiono, S. Sos, MM sebagai Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di DPMD Kabupaten Blitar pada tanggal 17 Oktober 2019

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sumari sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nglegok pada tanggal 2 September 2019

Menurut Pemerintah Desa Sumberasri selaku keterwakilan desa dari klaster agro yang disampaikan oleh bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri sebagai berikut

“Faktor penghambatnya saat ini yang jelas akses, karena jalan yang dilalui itu sebagian masuk jalan desa juga, karena anggaran desa juga terbatas, terus kita juga membagi perkembangan fisik itu di berbagai titik jadi nggak bisa instan.”¹⁴⁵

Dari yang disampaikan oleh Bapak Budi Kuantono di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Sumberasri yaitu akses, karena jalan yang dilalui menuju lokasi wisata merupakan jalan desa, dan desa masih belum mampu untuk membangun secara instan karena keterbatasan dana dan harus meratakan pembangunan yang ada di Desa Sumberasri.

Di sisi lain Bapak Saiful Mujab selaku ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok:

“Hambatannya yang lain berupa akses, kita kalau menuju Kecamatan Nglegok bagian utara itu seperti di Desa Sumberasri akses juga merupakan kendala. Disana memang banyak dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut material yang berat sehingga jalan menjadi rusak.”¹⁴⁶

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa akses atau sarana merupakan salah satu hal yang menghambat pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata. Akses jalan yang berada di Kecamatan Nglegok bagian utara seperti di Desa Sumberasri atau yang biasa dilewati kendaraan-

¹⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Budi Kuantono sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Sumberasri pada 30 Agustus 2019

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Sebagai Pokdarwis Desa Kemloko dan juga Ketua BUMDESMA Bumi Penataran Kecamatan Nglegok pada tanggal 8 Desember 2019

kendaraan truk pengangkut material banyak yang rusak. Hal tersebut menjadikan penghambat juga dalam mobilisasi menuju lokasi wisata-wisata Agrominawisata.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata merupakan hasil dari komunitas desa yang tergabung dalam suatu wadah yang memiliki kesamaan potensi yang disusun menjadi suatu konsep bersama dan difasilitasi oleh DPMD. Penyertaan modal awal yang masih tergolong minim juga menjadikan penyebab kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Berbeda halnya dengan Kawasan Perdesaan yang lain yang ada di Kabupaten Blitar yang memang sudah terlebih dahulu dibentuk dan sudah berjalan.